

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pembukuan BMD (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pengamanan BMD pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal ini disebabkan karena peraturan daerah yang tersedia saat ini tidak mengatur mengenai pencatatan secara spesifik, sehingga membuat pencatatan menjadi kurang terstruktur, masih banyak pengadaan yang menumpuk diakhir periode karena perencanaan pengadaan yang kurang matang dan banyak aset yang hilang tetapi masih tercatat dalam laporan barang SKPD.
2. Inventarisasi BMD (X2) secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengamanan BMD pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan inventarisasi, seperti dokumen pencatatan yang berbentuk Buku Induk Inventarisasi, Buku Inventarisasi, KIB dan KIR. Selain itu ada juga bukti dari dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventarisasi dan daftar mutasi barang.
3. Pelaporan BMD (X3) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah kabupaten Banyuasin. Hal ini dikarenakan setiap OPD telah berhasil menyusun laporan hasil barang milik daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil pengujian secara simultan atau secara bersama-sama Penatausahaan BMD yang diukur melalui variabel Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dengan

hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,291, hal ini menginterpretasikan bahwa variabel X (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) terhadap keberhasilan Pengamanan Barang Milik Daerah (Y) memiliki pengaruh sebesar 29,1% terhadap pengamanan BMD pada pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada butir 5.1, beberapa saran atau masukan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Kepala OPD, Sekretaris, dan Kasubag di bidang pengelolaan barang milik daerah pada setiap OPD di Kabupaten Banyuasin diharapkan mampu untuk lebih teliti dalam melakukan pembukuan aset daerah. Hal ini dikarenakan Setiap OPD wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), sangat penting bagi pihak yang terkait dalam proses pembukuan untuk lebih memahami pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasinya. Sehingga akan lebih baik jika pembukuan di Kabupaten Banyuasin lebih ditingkatkan dan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.
2. Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubag di bidang pengelolaan barang milik daerah pada setiap OPD di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk secara cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing terkait kegiatan inventarisasi. Mengingat proses inventarisasi inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen dalam pembuatan hasil laporan barang milik daerah, sehingga apabila pemerintah kabupaten melakukan sistem inventarisasi yang baik maka akan berdampak baik untuk keberhasilan pengamanan Barang milik daerah.
3. Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubag di bidang pengelolaan barang milik daerah pada setiap OPD di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan barang milik daerah baik

laporan semesteran maupun laporan tahunan. Karena dari hasil laporan inilah akan menggambarkan jumlah aset yang terdaftar benar-benar sama dengan jumlah yang sebenarnya sebagai bukti dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih reliable di lingkungan aktifitas pemerintah Kabupaten Banyuasin.

4. Kepala OPD, Sekretaris, Kabid dan Kasubag di bidang pengelolaan barang milik daerah pada setiap OPD di Kabupaten Banyuasin diharapkan lebih memperhatikan lagi proses penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dengan lebih baik lagi. Karena apabila kegiatan penatausahaan telah dilakukan dengan baik maka akan memudahkan untuk mendapatkan sistem informasi yang akurat sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang lebih efektif dan efisien.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih teliti dalam pemilihan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk mencari dan menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel pengamanan barang milik daerah.